

**DINAMIKA PERJUANGAN BADAN FEDERASI UMAT ISLAM  
MENUJU KEMERDEKAAN INDONESIA, 1937-1945**

Miftahuddin, Danar Widiyanta, Hasbi Mawardi  
Email: [miftahuddin@uny.ac.id](mailto:miftahuddin@uny.ac.id), [danar\\_widiyanta@uny.ac.id](mailto:danar_widiyanta@uny.ac.id)

**Abstrak-** Kajian ini akan melihat salah satu komponen masyarakat Islam awal abad ke-20 dalam usaha dan perjuangannya untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Langkah-langkah kajian ini mencakup heuristik (pengumpulan sumber sejarah), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi atau penyusunan fakta-fakta sejarah yang saling terkait yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun. Hasil kajian ini adalah bahwa umat Islam melalui para tokohnya sadar bahwa tanpa adanya persatuan mustahil kemerdekaan dapat diwujudkan. Untuk itu, muncullah organisasi MIAI (Majelis Islam 'A'laa Indonesia), Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia), dan Laskar Hizbullah sebagai alat perjuangan. MIAI adalah organisasi federasi yang bertujuan membicarakan dan memutuskan perkara yang dipandang penting bagi kemaslahatan umat Islam melalui jalur politik, walaupun bukan politik praktis. Demikian pula, Masyumi terbentuk sebagai suatu wadah perjuangan bagi umat Islam setelah MIAI dibubarkan pada masa Jepang, sementara dengan bersatunya tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah menjadikan organisasi Masyumi ini semakin kuat. Selanjutnya, salah satu faktor yang melatar belakangi timbulnya keinginan tokoh-tokoh Islam untuk mendirikan *Hizbullah* ialah, bahwa berperang untuk mempertahankan agama Allah hukumnya wajib. Dengan wadah *Hizbullah* ini diharapkan umat Islam bisa menopang cita-citanya dalam meraih kemerdekaannya.

**Kata Kunci:** *Federasi, Hizbullah, Kemerdekaan Indonesia, MIAI, Masyumi, Perjuangan, Umat Islam.*

**TITLE SHOULD BE CONDENSE, DESCRIBING THE CONTENT AND NOT MORE  
THAN THIRTEEN WORDS**

Author  
Affiliation (your institution)  
e-mail: author@email.ac.id

**Abstract-** This study will look at one of the components of Islamic society in the early 20th century in its efforts and struggles to realize Indonesian independence. The steps of this study include heuristics (collection of historical sources), verification (source criticism), interpretation, and historiography or compilation of interrelated historical facts obtained from various sources that have been collected. The result of this study is that Muslims through their leaders are aware that without unity it is impossible for independence to be realized. For this reason, the MIAI (Islamic Council 'A'laa Indonesia) organization emerged, Masyumi (Indonesian Muslim Shura Council), and Laskar Hezbollah as a means of struggle. MIAI is a federation organization that aims to discuss and decide matters that are considered important for the benefit of Muslims through political channels, although not practical politics. Likewise, Masyumi was formed as a forum for struggle for Muslims after MIAI was disbanded during the Japanese period, while the union of NU and Muhammadiyah figures made the Masyumi organization even stronger. Furthermore, one of the factors behind the emergence of

the desire of Islamic leaders to establish Hezbollah is that fighting to defend Allah's religion is obligatory. With this Hezbollah forum, it is hoped that Muslims can support their ideals in achieving their independence..

**Keywords:** *Hezbollah, Indonesian Independence, MIAI, Masyumi, Islamic Struggle*



## Pendahuluan

Awal abad ke-20 dalam sejarah bangsa Indonesia dikenal dengan zaman Kebangkitan Nasional. Pada era ini kesadaran nasionalisme sebagai bangsa yang terjajah mulai menemukan bentuknya. Baik organisasi masyarakat maupun politik mulai bermunculan, yang semua itu melandaskan pada perjuangan merebut kemerdekaan. Dalam sejarah perjuangan bangsa, masyarakat bangsa ini diingatkan dengan munculnya Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, PNI, dan Partindo.<sup>1</sup> Tidak ketinggalan kemunculan Muhammadiyah, Jamiat Khair, Al-Irsyad, dan Nahdatul Ulama (NU) adalah bagian yang mewarnai sejarah era Kebangkitan Nasional. Yang menarik untuk dikaji adalah, ada sisi-sisi yang perlu ditekankan dan disoroti terkait dengan peran umat Islam dalam sejarah Indonesia. Misalnya, peran mereka dalam badan-badan perjuangan seperti PII, MIAI, Masyumi, dan *Hizbullah*.

Pada dasarnya ada kunci keberhasilan dalam perjuangan umat Islam awal abad ke-20, yaitu adanya

persatuan untuk mewujudkan tujuan yang sama, tanpa melihat golongan dan paham keagamaan yang dianutnya. Terbukti, dengan adanya persatuan antar golongan atau organisasi dalam Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Jamiat Khair, Al-Irsyad, Al-Islam, Al-Hidayatul Islamiyah, dan PUI, badan-badan perjuangan seperti, MIAI, Masyumi, dan *Hizbullah* dapat terwujud. Dapat dilihat pula, dengan terbentuknya badan-badan perjuangan yang bersifat federasi tersebut, kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, baik Belanda maupun Jepang yang tidak adil, dapat ditekan dan diimbangi.

MIAI, misalnya, memberikan dukungan terhadap tuntutan Indonesia berparlemen. MIAI memang tidak bergerak dalam bidang politik, tetapi ia tidak dapat mengabaikannya dikarenakan anggota-anggotanya yang bersifat politik serta banyak kalangan Islam umumnya terlibat dalam soal politik ini. Hal ini sekaligus, menurut Deliar Noer, mencerminkan tidak adanya pemisahan antara agama dan politik dalam Islam. MIAI juga

---

<sup>1</sup>Lihat Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*, (Jakarta: Gramedia, 1999), atau *Volume 17 No. 2*

Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

menyatakan keinginannya untuk membuat amandemen. Antara lain, karena jumlah yang paling besar rakyat Indonesia adalah berkeyakinan Islam, maka sudah semestinya Staatshoofd (Kepala Negara) Indonesia adalah seorang bangsa Indonesia yang beragama Islam. Hal ini bukan berarti bahwa kepentingan-kepentingan golongan bangsa Indonesia yang lain, yang kepercayaannya lain, akan terlantar, karena ajaran-ajaran Islam tidak mungkin bertindak keluar dari keadilan.<sup>2</sup>

### Metode Penelitian

Sejarah sebagai suatu ilmu merupakan suatu rekonstruksi masa lalu yang terikat pada prosedur penelitian sejarah<sup>3</sup> (metode penelitian sejarah). Metode yang bercorak kesejarahan menurut Lueey<sup>4</sup> adalah suatu sistem aturan dan prosedur untuk mengumpulkan saksi atau kesaksian dari suatu masa atau peristiwa,

mengevaluasi saksi atau kesaksian tersebut, untuk menyusun fakta-fakta yang terbukti memiliki hubungan kausal, dan akhirnya menghadirkan atau menyajikannya dalam suatu uraian yang bersifat ilmiah.

Pengertian lebih khusus, sebagaimana dikemukakan Garraghan,<sup>5</sup> bahwa Metode Penelitian Sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Senada dengan pengertian ini, Louis Gottchalk<sup>6</sup> menjelaskan Metode Sejarah adalah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

Mengacu pada pengertian di atas, maka implementasi dari langkah-

---

<sup>2</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 290.

<sup>3</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1999), hlm. 12

<sup>4</sup> William Leo Lueey, *History: Method and Interpretation*, (Chicago: Layola University Press, 1958), hlm. 27-28.

<sup>5</sup> Gilbert J. Garraghan, S.J., *A Guide Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 33.

<sup>6</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 32.

langkah kajian ini mencakup heuristik (pengumpulan sumber sejarah), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam kajian ini adalah majalah dan buku yang sezaman, buku-buku hasil penelitian, dan artikel-artikel hasil kajian. Selanjutnya kritik sumber dilakukan dalam konteks menegaskan tentang kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dalam rangka mendapatkan fakta-fakta yang kredibel atau dapat dipercaya. Fakta-fakta yang diperoleh sesuai dengan tema selanjutnya diinterpretasi baik secara analitis maupun sintesis untuk memperoleh keterkaitan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Yang terakhir, fakta-fakta yang telah terkumpul dan saling terkait tersebut dilakukan penyusunan secara kronologis untuk mendapatkan cerita sejarah (historiografi).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Perjuangan MIAI

Berawal dari umat Islam pada umumnya, secara bersama-sama

menghadapi berbagai macam persoalan, seperti permasalahan penghinaan Nabi Muhammad, adanya Ordonansi Perkawinan, persoalan hak waris, *Raad* Agama, dan persoalan Palestina. Untuk itu, K.H Mas Mansyur dari Muhammadiyah dan K.H.A Wahab Hasbullah dari NU, Wondoamiseno dari PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), dan KH. Dahlan dari NU memprakarsai adanya rapat gabungan organisasi-organisasi Islam pada tanggal 18-21 September 1937 di Surabaya.<sup>7</sup> Pada bulan September 1937 tersebut, pemimpin NU dan Muhammadiyah memprakarsai pembentukan Majelis Islam A'laa Indonesia (Dewan Islam Tertinggi Indonesia, MIAI).<sup>8</sup> Sementara itu, organisasi-organisasi Islam yang menyatakan menjadi anggota MIAI adalah Lajnah Tanfidziyah NU, PSII, Pengurus Besar Muhammadiyah, Pengurus Besar Al-Islam, Pengurus Besar PUI, Al-Irsyad, Al-Hidayatul Islamiyah Banyuwangi, dan Al-Khairiyah Surabaya.<sup>9</sup>

Tujuan dibentuknya MIAI ini adalah untuk membicarakan dan

<sup>7</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 262.

<sup>8</sup> Mc Ricklefts, "A History of Modern Indonesia", a.b. Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 290.

<sup>9</sup> Djarnawi Hadikusuma, *Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin al Afghani sampai K.H Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta: Persatuan, t.t), hlm. 87.

memutuskan perkara yang dipandang penting bagi kemaslahatan umat Islam dan agama Islam. Keputusan tersebut harus dipegang teguh dan dilakukan bersama-sama oleh segenap organisasi-organisasi yang menjadi anggotanya. Hal ini dikarenakan perlunya persatuan kegiatan kaum Muslimin di tanah air dan umumnya kaum Muslimin di dunia. Selanjutnya, akan diusahakan untuk mengadakan perdamaian apabila timbul pertikaian di antara golongan umat Islam Indonesia, baik yang telah bergabung dengan MIAI, maupun yang belum. Cita-cita persatuan tersebut dijelaskan oleh panitia kecil yang terdiri dari Abikusno dari SI, K.H Mas Mansyur dan Ki Bagus Hadikusuma dari Muhammadiyah, dan Sukiman dari PII. Mereka menyusun pedoman tentang perlunya persatuan berdasarkan Al-Qur'an.<sup>10</sup>

Tujuan MIAI memang tidak mengarah pada bidang politik praktis dikarenakan ketatnya penjajah kolonial Belanda terhadap potensi persatuan Islam. Akan tetapi, perubahan terjadi pada masa-masa tahun terakhir

menjelang jatuhnya Hindia Belanda, yaitu tuntutan MIAI yang bersifat politis dapat diperhatikan dari keputusan-keputusan kongres yang diadakannya.<sup>11</sup> Pembentukan MIAI disambut baik oleh kalangan Islam. Pada awal berdirinya, MIAI hanya beranggotakan 7 organisasi, sedangkan pada tahun 1941 berkembang menjadi 21 organisasi. Sebagai organisasi yang bersifat federatif, keanggotaannya sangat longgar dan bukan merupakan kesatuan yang mengikat.<sup>12</sup>

Keberadaan MIAI memang dapat dikatakan penting dalam konteks sosial-politik saat itu. MIAI didukung oleh dua organisasi agama bermassa besar dan riil yang berpotensi dapat berbicara banyak dalam kontelasi sosialpolitik saat itu, yaitu di saat partai Sarekat Islam menghadapi saat-saat krisisnyanya. MIAI hadir untuk memecahkan kebekuan dialogis antara kubu Islam dan nasionalis. Apalagi sejak pemerintah kolonial menyingkirkan Soekarno dan tokoh-tokoh nasionalis non-kooperatif yang diasingkan ke luar Jawa, peran organisasi pendukung

---

<sup>10</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 262-263.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 265-166.

<sup>12</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan*

*Jepang*, terj. Daniel Dhakidae, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 119.

MIAI semakin signifikan. Keterlibatan organisasi pendukung MIAI dapat dilihat juga dalam peran yang dimainkannya di era pasca perang dunia kedua. Pada saat itu, semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan semakin berkobar, dan yang ada dalam pikiran elemen-elemen pendukung Indonesia merdeka adalah bagaimana menyatukan visi dan langkah agar gerakan pro-kemerdekaan bisa berjalan dengan efektif. Dalam konteks inilah bertemu momentum, bawa kelompok nasionalis dan agamis (Islam), kooperatif dan non-kooperatif dapat bersatu dalam bentuk nasionalisme baru yang khas Indonesia.<sup>13</sup>

## 2. Pembubaran MIAI dan Terbentuknya Masyumi

Pada masa pendudukan Jepang, perkembangan MIAI yang pesat menimbulkan kekhawatiran pemerintah Jepang. Aktifitas MIAI pada kenyataannya tidak sejalan dengan keinginan Jepang, hingga akhirnya MIAI dinyatakan bubar pada 24

Oktober 1943 dan digantikan dengan Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi).<sup>14</sup> Sebelumnya, pada awal tahun 1943 pihak Jepang hanya mengerahkan usaha-usaha pada tingkat mobilisasi saja.<sup>15</sup> Menurut HJ Benda, terbentuknya Masyumi merupakan kemenangan politik Jepang terhadap Islam. Tujuan dari Masyumi menurut anggaran dasarnya adalah mengendalikan dan merapatkan hubungan antara perkumpulan-perkumpulan agama Islam di Jawa dan Madura. Di samping itu, juga untuk memimpin dan memelihara pekerjaan perkumpulan tersebut dalam rangka mempertinggi peradaban agar umat Islam mau membantu dan menyumbangkan tenaganya untuk memelihara lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya di bawah pimpinan *Dai Nippon*. Tujuan seperti itu dipandang oleh umat Islam sesuai perintah Allah.<sup>16</sup>

Memang pada tahun-tahun akhir kekuasaan Hindia Belanda, tekanan terhadap kegiatan politik rakyat

---

<sup>13</sup>Anjar Nugroho, "Wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler," *Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.9 No.2 Juli - Desember 2013, hlm. 136.

<sup>14</sup>A Muin Umar, dkk, *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan Seminar IAIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 57-58.

<sup>15</sup> Mc. Rickleft, *op.cit.*, hlm. 305.

<sup>16</sup> Harry J. Benda., *op.cit.*, hlm. 185.



Indonesia dirasakan semakin keras. Hal itu mengakibatkan banyak para pimpinan umat Islam yang akhirnya menaruh simpati terhadap Jepang. Terlebih lagi Jepang telah melakukan propaganda-propaganda jauh sebelum masuk ke Indonesia. Propaganda tersebut diawali sejak tahun 1935 di Kobe dengan didirikannya masjid yang pertama di Jepang. Kemudian disusul dengan mendirikan masjid di Tokyo pada 1938, dan diikuti dengan mendirikan Perserikatan Islam Jepang (*Dai Nippon Kaikyo Kyokai*) pada 1938 yang dipimpin oleh jendral Senjuro Hayashi yang dikenal sebagai *Bapak Islam Jepang*.<sup>17</sup>

Untuk menarik perhatian pemimpin umat Islam Timur Tengah, maka dalam pembukaan Masjid Kobe tersebut diundanglah pangeran Husein dari Yaman. Di samping itu, pada 5-29 November 1939, Jepang mengadakan Pameran Islam di Tokyo dengan sasaran umat Islam Indonesia. Demikian pula, diundang pemimpin MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia*), suatu organisasi federasi Islam yang telah berdiri pada

akhir masa pemerintahan kolonial Belanda. Dalam rangka menanggapi undangan tersebut, MIAI menunjuk utusannya yang terdiri dari Abdul Kahar Muzakkir, Mr. Kasmat, Faried Ma'roef, Machfoed Sidiq, dan Abdoellah Al-Moedi. Undangan pameran itu merupakan peristiwa pertama pemindahan pandangan umat Islam Indonesia. Selama berada di Jepang, para ulama dan pimpinan partai politik Islam diberlakukan dengan hormat. Sebaliknya, perlakuan pemerintah Kolonial Belanda terhadap ulama atau pimpinan partai Islam di Indonesia sangat berbeda jauh dan selalu bersikap menindas.<sup>18</sup>

Sejak semula Jepang telah menyadari akan besarnya pengaruh ulama sebagai pimpinan Islam di tengah-tengah rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sejak awal Jepang berada di Indonesia, mereka berupaya menarik simpati para pimpinan Islam yang dilakukan secara intensif. Jepang sangat menyadari bahwa Islam merupakan salah satu sarana terpenting untuk langkah infiltrasi guna menanamkan

---

<sup>17</sup> Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010), hlm.13.

<sup>18</sup> Harry J. Benda, *op. cit.*, hlm. 119.

pengaruh dan pikiran serta cita-cita fasisme mereka.<sup>19</sup>

Terlebih lagi, pada awal pendudukannya, Jepang juga membentuk *Shumubu* (Kantor Departemen Agama) di ibukota, dan pada tahun 1944 dibuka cabang-cabangnya di seluruh Indonesia dengan nama *Shumuk*.<sup>20</sup> Pada awalnya, badan ini diketuai oleh seorang Jepang bernama Horie (1942), kemudian digantikan oleh Prof. Husein Djajaningrat, dan kemudian oleh K.H. Hasyim Asy'ari (1944).<sup>21</sup> Pemerintah Jepang juga mengadakan pelatihan penghulu, urusan-urusan kenegaraan, dan lain sebagainya. Untuk menarik simpati umat Islam, Jepang menerima permintaan para ulama untuk tidak membubarkan MIAI. Dengan tidak dibubarkannya MIAI Jepang memperoleh simpati umat Islam, karena MIAI dipandang wadah organisasi penting bagi umat Islam untuk melakukan konsolidasi dan mengatur siasat menghadapi penguasa pendudukan

Jepang. Namun demikian, adanya dekrit yang dikeluarkan oleh pemimpin Jepang di Indonesia, Jendral Imamura,<sup>22</sup> yang berisikan larangan aktifitas politik bangsa Indonesia, maka MIAI mengalami pasang surut setelah adanya organisasi Islam yang baru yakni Persiapan Persatuan Umat Islam, yang merupakan ranting dari Gerakan 3A Jepang.<sup>23</sup>

Setelah timbul kecurigaan Jepang terhadap MIAI karena ketidaksukaan terhadap penguasa Jepang, maka Jepang melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh MIAI, yakni K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Mahfud Shiddiq karena dituduh menghasut rakyat. Menyadari kesalahannya terhadap apa yang telah dilakukan, yang mendapat reaksi keras dari rakyat Indonesia terutama dari kaum santri, Jepang segera membebaskan mereka dan memberi undangan kepada ulama se-Jawa dan Madura untuk diberikan penjelasan tentang kekeliruannya.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup>B.J. Holland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, terj. Saefudin Bahr (Jakarta: Grafiti, 1985), hlm. 11.

<sup>20</sup> Harry J. Benda, *op. cit.*, hlm. 98.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>22</sup>Jenderal Imamura seorang panglima balatentara Jepang ke-Enam belas yang mendarat pada malam hari tanggal 28 Februari 1942 di pantai

barat laut Jawa, lihat.L.D Jong (ed.) *Pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta: Kasaint Blanc Indah, 1987), hlm. 6.

<sup>23</sup>Harry J. Benda, *op. cit.*, hlm. 144.

<sup>24</sup>Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Solo: Jatayu Sala. 1985), hlm. 116.

Kepada para ulama, Jepang yang pada saat itu diwakili Letnan Jendral Okazaki mengatakan bahwa Jepang akan melindungi dan mengindahkan agama Islam agar bisa menyesuaikan diri dan bisa bersatu dengan umat Islam Indonesia. Sebagai hasil dari beberapa kali melakukan pertemuan dengan Gunseiken, MIAI akhirnya mendapatkan sebuah kantor yang berada di Jakarta, serta diberi izin untuk menerbitkan majalah setengah bulanan yang diberi nama Suara Islam.<sup>25</sup> Ini semu adalah wadah penyampaian misi Jepang melalui MIAI, yakni untuk memberi keterangan kepada rakyat Indonesia bahwa upaya Jepang yang sesungguhnya adalah ingin menjadikan Lingkungan Kemakmuran Bersama se-Asia Timur Raya.<sup>26</sup>

Keberadaan MIAI memang sangat memberi kontribusi sangat banyak bagi umat Islam. Terbitnya Suara Islam adalah salah satu keuntungan besar bagi para pemimpin Islam, sebab hal itu tidak bisa didapatkan oleh kaum nasionalis yang sebelumnya telah beberapa kali

mengajukan permohonan kepada pemerintahan Jepang untuk menerbitkan majalah.<sup>27</sup> Akan tetapi, setelah Jepang menyadari bahwa MIAI bermanfaat bagi umat Islam dan tidak memberikan keuntungan terhadap pemerintahan Jepang, maka pada akhir 1943 Jepang membubarkan MIAI. Tindakan Jepang ini menjadikan pukulan yang sangat berat bagi umat Islam.

Setelah MIAI dibubarkan, para pemimpin dua organisasi ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah, berhasil mendirikan lagi suatu wadah perjuangan bagi umat Islam dengan sebutan “Masyumi” (*Majlis Syuro Muslimin Indonesia*), yang merupakan pengganti dari MIAI. Pendirian Masyumi tersebut disahkan oleh pemerintahan Jepang pada oktober 1943. Badan kepengurusan Masyumi sendiri terdiri dari beberapa tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah, yakni K.H Hasyim Asy’ari sebagai ketua, K.H Mas Mansur dan K.H. A. Wahid Hasyim sebagai wakil ketua yang merangkap sebagai pengurus harian

---

<sup>25</sup>H. Abu Bakar, *Sejarah Hidup K.H A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, (Jakarta: Panitia Penerbitan Buku Peringatan Alm. K.H. A. Wahid Hasyim, 1957), hlm. 322.

<sup>26</sup>L.D Jong, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>27</sup> Harry J. Benda, *op. cit.*, hlm. 149.

Masyumi. Sementara itu, ketua PBNU serta ketua PP Muhammadiyah dijadikan sebagai penasihat khusus Masyumi.<sup>28</sup> Bersatunya tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah menjadikan organisasi Masyumi semakin kuat, ditambah dengan tidak adanya tekanan dari Jepang.

Berdasarkan hasil rapat untuk membentuk susunan pengurus Masyumi pada tanggal 25 Januari 1944 di Jakarta, maka susunan pengurus Masyumi adalah sebagai berikut, Ketua Besar: KH. Hasyim Asy'ari, Ketua Muda: KH. A. Wahid Hasyim, Ketua Muda II: A. Mukthi, Pembantu: KH. Mochtar, Kartosudarmo, Zainul Arifin, KH. Mas Mansur, KH. Sadri, HM. Hasyim, KH. Nachrawi Thahir, HM. Farid Ma'ruf, dan Penasihat: Ki Bagus Hadikusumo dan KH. Wahab Hasbullah.<sup>29</sup>

Masyumi lahir pada 7 Agustus 1945, ketika Jepang mulai sibuk bertahan dalam Perang Pasifik. Jepang merestui pendirian organisasi Islam itu dengan harapan kekuatan Islam akan membantu dalam perang. Padahal para pendiri Masyumi KH. Wachid Hasyim,

Mohammad Natsir, Kartosoewirjo, dan lainnya menghendaki organisasi ini dapat menghadirkan semangat Islam dalam perang kemerdekaan. Keuntungan politik Jepang dengan berdirinya Masyumi adalah dalam rangka menyingkirkan pemimpin PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) yang merupakan partai politik Islam non-koperatif terbesar pada masa kolonial.<sup>30</sup>

Meskipun pada awal berdirinya Masyumi di bawah pengaruh kekuasaan Jepang dengan menjalankan gerakan melipatgandakan hasil bumi untuk kepentingan Jepang,<sup>31</sup> tetapi hal itu bisa ditanggulangi oleh pemimpin-pemimpin Masyumi dengan mengajak para tokoh muda untuk masuk ke dalam Masyumi, seperti Mohammad Munasir, Zainal Arifin, dan beberapa tokoh muda lainnya. Gerakan Masyumi ini terbukti dapat mengembalikan pada cita-cita awal pendirian Masyumi sebagai wadah perjuangan umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dengan dukungan Jepang yang memberikan porsi lebih besar kepada golongan Islam dibandingkan dengan Belanda, menyebabkan golongan Islam

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 302.

<sup>29</sup> Soera Meoslimin Indonesia, 1 Februari 2604, hlm. 11

Volume 17 No. 2

<sup>30</sup> Harry J. Benda, *op. cit.*, hlm. 185.

<sup>31</sup> H. Abu Bakar, *op. cit.*, hlm. 331.

dapat berperan lebih besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Menurut Deliar Noer<sup>32</sup> ada beberapa faktor yang mendorong Jepang mengesahkan kembali ormas-ormas Islam. *Pertama*, Jepang mengalami kemunduran kedudukan dalam Perang Pasifik. Hal itu menyebabkan Jepang memerlukan bantuan yang lebih besar dari rakyat, khususnya penduduk di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu organisasi yang dipatuhi oleh penduduk. *Kedua*, kenyataan bahwa organisasi-organisasi tersebut, walaupun tidak resmi, masih melanjutkan kegiatan mereka dengan pimpinan dan guru-guru setempat, bahkan masih sering menjaga koordinasi di antara sesama mereka. Hubungan tidak resmi tersebut mempersulit Jepang dalam melakukan pengawasan. Dengan pengesahan ini, maka pengawasan akan lebih mudah dilakukan. *Ketiga*, pengakuan Jepang terhadap fungsi Putera dan kemudian Himpunan Kebaktian Rakyat (*Jawa Hokokai*) yang tidak mampu memperoleh dukungan penuh dari kalangan Islam. *Keempat*, Jepang

tampaknya ingin memperbaiki beberapa kesalahan yang telah diperbuatnya terhadap kalangan Islam, seperti mewajibkan pelaksanaan upacara *sai keirei* (memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan 90° ke arah Tokyo), menahan K.H. Hasyim Asya'ari selama empat bulan, dan menutup beberapa madrasah dan pesantren selama beberapa bulan pada awal pendudukan.

Menurut Benda, terdapat tiga perbedaan kebijaksanaan Belanda dengan Jepang terhadap Islam pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya.<sup>33</sup> *Pertama*, pada masa penjajahan Belanda, yang menjadi sandaran politik kolonial adalah kaum priyayi, sedangkan pada masa pendudukan Jepang adalah golongan Islam dan nasionalis sekuler. *Kedua*, pada masa penjajahan Belanda, pemimpin nasionalis sekuler mengalami penindasan, misalnya, dibuang, sedangkan pada masa Jepang pemimpin nasionalis sekuler diakui secara resmi dan diangkat menjadi pejabat dalam pemerintahan militer Jepang. *Ketiga*, pemerintah Hindia Belanda tidak pernah memberi angin kepada golongan

---

<sup>32</sup> Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>33</sup> Harry J. Benda, *op. cit.*, hlm. 199-201.

Islam, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang justru sebaliknya. Dalam hal ini, pemerintah Jepang meningkatkan posisi Islam baik dalam bidang sosial-religius maupun dalam bidang politik. Kenyataan ini sangat mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia kelak.

### 3. Terbentuknya Laskar Hizbullah

Menjelang akhir tahun 1944, keberadaan posisi Jepang diketahui semakin terjepit dalam Perang Pasifik dan juga dalam perpolitikan internasional. Untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia dan memperoleh dukungan tenaga perang agar bisa membantu Dai Nippon mencapai kemenangan bagi bangsa Asia, maka Perdana Menteri Jepang Kaiso berjanji akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pengumuman itu adalah hasil dari sidang istimewa perlemen Jepang ke-85 di tokyo.<sup>34</sup> Sementara itu, di Indonesia berita

tersebut disampaikan secara resmi oleh Gunseiken.<sup>35</sup> Sebagaimana dikatakan bahwa, “di daerah Hindia Timur, pada tahun yang lalu, kerajaan Dai Nippon telah mengambil tindakan.”<sup>36</sup>

Untuk Mendapatkan tenaga serdadu cadangan yang akan dikirim ke Birma dan kepulauan pasifik, Jepang melakukan pendekatan pada tokoh--tokoh Jawa Hukokai. Disamping itu, penguasa Jepang juga melakukan pendekatan kepada para ulama dan tokoh-tokoh Islam melalui seorang berkebangsaan Jepang yang beragama Islam, Abdul Hamid Ono.<sup>37</sup> Atas nama penguasa Jepang Abdul Hamid Ono meminta kepada KH. A. Wachid Hasyim agar mengerahkan para santri untuk masuk Heiho. Akan tetapi, KH. A. Wachid Hasyim tidak memenuhi permintaan itu, bahkan beliau menjawab bahwa pemuda-pemuda santri lebih baik diberi latihan kemiliteran untuk pertahanan di dalam negeri. Menurutnya, mempertahankan sejengkal tanah air di dalam negeri akan lebih menggugah semangat pemuda-

---

<sup>34</sup> Barlan Setiadijaya, *Merdeka Atau Mati di Surabaya Jilid I*, (Jakarta: Widyaswara Kewiraan, 1985), hlm. 25.

<sup>35</sup> H. Abu Bakar, *op. cit.*, hlm. 337.

<sup>36</sup> Majalah Asia Raya, *Berita tentang Indonesia Merdeka*. Tahun 1944.

<sup>37</sup> Abdul Hamid Ono adalah orang Jepang yang ditugaskan membayang-bayangi KH. A. Wahid Hasyim. Lihat Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS. 2012), hlm. 190.

pemuda santri dari pada bertempur di daerah yang letaknya jauh dari tanah air. Selain itu, dalam menghadapi kekuatan tentara Sekutu di medan perang harus di serahkan kepada tentara-tentara yang profesional, ialah tentara Dai Nippon. Di dalam peperangan, pemuda-pemuda yang kurang terlatih hanya akan menyulitkan tentara Jepang yang telah terlatih.<sup>38</sup>

Permintaan itulah yang kemudian mengilhami Wachid Hasyim dan tokoh-tokoh Masyumi untuk mendidik para santri di dalam kemiliteran, yang kemudian diberi nama "*Hizbullah*" (Tentara Allah). Pemuda-pemuda santri di persiapkan untuk menghadapi musuh. Faktor lain yang melatar belakangi timbulnya keinginan tokoh-tokoh Islam untuk mendirikan *Hizbullah* ialah bahwa berperang untuk mempertahankan agama Allah hukumnya wajib. Atas nama pemimpin Masyumi, Wachid Hasyim mengusulkan keinginan tokoh-tokoh Islam, melalui Abdul Hamid Ono, untuk disampaikan kepada pemerintah Dai Nippon yang kemudian diterima oleh Dai Nippon.

Terbentuknya *Hizbullah* sangat penting artinya bagi umat Islam. Dengan wadah itu diharapkan umat Islam bisa menopang cita-citanya dalam meraih kemerdekaannya. Jadi, terbentuknya *Hizbullah* adalah suatu peristiwa yang spektakuler di dalam gerakan Islam. Menurut Boland, berdirinya *Hizbullah* adalah satu dari tiga keuntungan yang diperoleh umat Islam pada masa pendudukan Jepang.<sup>39</sup>

*Hizbullah* berdiri secara resmi pada 14 Oktober 1944. Dengan terbentuknya *Hizbullah*, umat Islam mendapatkan peluang yang besar untuk membenahi diri serta mengatur langkah dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Keberadaan *Hizbullah* juga diharapkan akan membawa angin baik bagi Jepang untuk membantu pertahanan dalam menghadapi serangan Sekutu. Sementara itu, tujuan didirikannya *Hizbullah* dijelaskan pada pendahuluan peraturan Dasar *Hizbullah*, bahwa "mengingat memuncaknya perang pada dewasa ini dan tanah Jawa sebagai garis pertahanan terkemuka, maka untuk menunjang perintah-perintah Islam yang sesuai dengan keinginan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 191-192.

<sup>39</sup> Holland, B.J., *op. cit.*, hlm. 15

pemerintah Balatentara Dai Nippon, kita membentuk barisan yang bermaksud untuk menyadarkan segenap umat Islam serta selalu membesarkan segala daya dan membulatkan segala tenaga buat berjuang bersama-sama Dai Nippon di jalan Allah. Jika musuh berani menyerang tanah Jawa, maka perbuatan barisan ini dapat menjadi contoh teladan bagi umat Islam pada umumnya. Terbentuknya *Hizbullah* adalah guna membantu menciptakan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya pada umumnya, dan pada khususnya mencapai Indonesia merdeka, yaitu untuk membela agama Islam, bangsa dan tanah air.”<sup>40</sup>

Baik sebagai barisan untuk mengamankan agama Islam sendiri maupun sebagai alat untuk merebut kemerdekaan, keberadaan *Hizbullah* cukup menguatkan posisi umat Islam, meskipun tujuan pembentukannya mempunyai tendensi yang besar untuk membantu Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu. Selanjutnya, tiga bulan setelah *Hizbullah* terbentuk, tepatnya pada awal Januari 1945, Masyumi mengumumkan

anggota Dewan Pengurus Pusat *Hizbullah* dengan susunan kepengurusan sebagai berikut, Ketua: KH. Zainul Arifin, Wakil Ketua: Mr. Mohammad Roem, Anggota: S. Soerowiyono dan Soedjono (Urusan Umum), Anwar Tjokroaminoto, KH. Zarkasyi, Masyhudi (Bagian Propaganda), Mr. Jusuf Wibisono, Sunaryo Mangun Puspito dan Muhammad Djunaedi (Urusan Perencanaan).<sup>41</sup>

Sementara itu, Markas Tertinggi *Hizbullah* ditetapkan di Jakarta dan ketua *Hizbullah* disebut Ketua Markas Tertinggi bukan panglima atau upanglima tertinggi. Masalah sebutan tidak dipersoalkan oleh tokoh-tokoh Masyumi, karena yang melatarbelakangi berdirinya *Hizbullah* hanyalah semata-mata untuk berjuang dalam merebut kemerdekaan. Pelaksanaan perjuangan itulah yang harus diutamakan. Tentang hal-hal lain, termasuk siapa yang akan menjadi panglima tertinggi dalam tentara Indonesia adalah soal yang bisa ditentukan kemudian.

---

<sup>40</sup> Majalah Tebu Ireng, Edisi April 1986, hlm. 9.

<sup>41</sup> Tim Peneliti Fakultas Adab IAIN Surabaya, *Sejarah Hizbullah Jawa Timur*, Surabaya, hlm. 54.



Setelah *Hizbullah* terbentuk, para tokoh Islam segera mengkampanyekan kepada seluruh umat Islam di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Pada pertengahan Desember 1944, perwakilan federasi Islam telah mengadakan perjalanan keliling Jawa untuk mengadakan inspeksi terhadap sukarelawan *Hizbullah* di semua karesidenan.

Untuk mengumpulkan para pemuda Islam yang akan dididik dalam kemiliteran, tokoh-tokoh Islam tidak menemui kesulitan, karena para pemuda Islam telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam membela tanah airnya dari cengkeraman penjajah. Banyak santri yang dengan kesadarannya sendiri serta restu para kiai bersedia menjadi anggota laskar *Hizbullah*. Kemudian, hal itu juga didukung oleh adanya kerja sama serta saling pengertian antara tokoh-tokoh di pusat dengan para pemimpin pesantren.

Pendidikan kemiliteran bagi anggota barisan *Hizbullah* dipusatkan di Cibarusa, Jawa Barat, diikuti sebanyak 500 pemuda Islam dari Jawa dan Madura, mereka berusia antara 18 sampai 25 tahun. Kota-kota

karesidenan yang mengirimkan utusannya ialah Jakarta, Banten, Surabaya, Sukabumi, Priangan, Purwakerto, Bogor, Pekalongan, Kedu, Surakarta, Semarang, Pati, Jogjakarta, Madiun, Kediri, Bojonegoro, Malang dan Besuki. Masing-masing mengirimkan utusan 25 orang.

Latihan itu dibuka pada 28 Pebruari 1945 dan dihadiri oleh Gunseikan, para perwira balatentara Dai Nippon, Pimpinan Pusat Masyumi, Pangreh Praja, dan lain-lain. Para anggota barisan *Hizbullah* mengikuti upacara dengan berseragam biru dengan *kopyah* hitam putih dan bersimbul bulan sabit dan bintang. Acara di mulai dengan pemeriksaan barisan oleh Gunseikan yang kemudian di lanjutkan dengan pidato sambutan Gunseikan, yang berbunyi: “berhubung dengan nasib Asia Timur Raya, maka masa sekarang adalah masa yang amat penting seperti yang belum pernah dialami atau terjadi di dalam sejarah. Dalam saat yang demikian itu, telah bangkit segenap umat Islam di Jawa serta berjanji akan berjuang "*Luhur bersama dan lebur bersama*" dengan balatentara Uai Nippon. Buktinya ialah

pembentukan barisan muda Islam yang bernama *Hizbullah*.<sup>42</sup>

Zainul Arifin sebagai ketua Markas Tertinggi *Hizbullah* dan Wachid Hasyim sebagai ketua muda Masyumi juga ikut menyampaikan sambutan. Kedua tokoh Islam itu mengingatkan kepada pemuda Islam peserta pendidikan terhadap pentingnya diselenggarakan latihan kemiliteran untuk membela agama Islam dan cita-cita perjuangan bangsa. Latihan diselenggarakan selama tiga bulan dipimpin oleh para Sydanco Peta, yang terdiri dari Abdullah Sajad, Zaini Nuri, Abd. Rachman, Kamal Idris dan lain-lainnya. Yang bertindak sebagai komandan latihan adalah seorang opsir Jepang Kapten Yanagawa.

Selain dilatih kemiliteran, para pemuda Islam itu juga diberi bekal pendidikan kerohanian. KH. Zarkasy (Gontor Ponorogo) KH. Mustofa Kamil (Jawa Barat), KH. Mawardi ( Solo ), KH. Mursyid ( Kediri ) adalah para ulama yang memberikan kerohanian. Di antara ulama yang paling banyak memberikan ceramah ialah KH. Mustofa Kamil dari Singaparna (Jawa Barat), serta KH. Abdul Halim dari

Majalengka, Pemimpin umum PUI, yang kadang-kadang juga memberikan pelajaran teknik membuat alat peledak.

## A. Kesimpulan

Dalam perjalanan sejarah kita dapat menyaksikan bahwa umat Islam lebih banyak terpecah dari pada bersatu. Kasus itu dapat di lihat di semua kawasan termasuk Indonesia. Sejak Nabi Muhammad SAW., pembawa ajaran Islam, meninggal dapat disaksikan umat Islam tidak satu lagi dan kadang sulit untuk bersatu. Tidak dapat bersatunya umat Islam bisa karena kepentingan politik, golongan, atau karena pemahaman ajaran Islam yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, umat Islam terpolarisasi ke dalam banyak golongan atau kelompok. Di awal abad ke-20 di Indonesia sudah tampak ada golongan yang disebut kaum modernis dan kaum tradisional. Selanjutnya dua golongan tersebut mengerucut membentuk organisasi seperti Muhammadiyah, Jamiat Khair, Al-Irsyad, dan Persis mewakili golongan modernis dan Nahdlatul Ulama (NU) mewakili golongan tradisional.

---

<sup>42</sup> Barlan Setiadijaya, *op. cit.*, hlm. 207.

Berdasarkan analisis sejarah, bersatunya umat Islam dapat dilihat tergantung pada figur pemimpin dan juga dapat karena adanya kepentingan bersama. Misalnya, figur-figur seperti Nabi Muhammad SAW., Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz adalah para pemimpin yang dapat menyatukan umat. Sekaligus, figur-figur tersebut adalah para pemimpin yang dapat menciptakan suasana kepentingan bersama umatnya, sehingga di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh tersebut dapat disaksikan umat Islam dapat bersatu. Persatuan umat Islam dari berbagai golongan juga dapat disaksikan dalam sejarah Indonesia. Mereka bersatu tanpa melihat perbedaan pemahaman keagamaannya dan apa kelompoknya, semua itu demi tercapainya Indonesia merdeka. Diketahui baik Majelis Islam A'laa Indonesia (Dewan Islam Tertinggi Indonesia, MIAI) dan Masyumi adalah organisasi federasi dari berbagai kelompok keagamaan umat Islam. Mereka adalah gabungan dari Lajnah Tanfidziyah NU, PSII, Pengurus Besar Muhammadiyah, Pengurus Besar Al-Islam, Pengurus Besar PUI, Al-Irsyad, Al-Hidayatul Islamiyah Banyuwangi, dan Al-Khairiyah Surabaya. Persatuan

mereka tidak lain adalah demi tercapainya Indonesia merdeka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Solo: Jatayu Sala, 1985).
- Abu Bakar, H., *Sejarah Hidup K.H A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, (Jakarta: Panitia Penerbitan Buku Peringatan Alm. K.H. A. Wahid Hasyim, 1957).
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Daniel Dhakidae, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).
- Garraghan, Gilbert J., *A Guide Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1957).
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1985).
- Hadikusuma, Djarnawi, *Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin al Afghani sampai K.H Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta: Persatuan, t.t).
- Holland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, terj. Saefudin Bahr (Jakarta: Grafiti, 1985).
- Jong, L.D. (ed.) *Pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta: Kasaint Blanc Indah, 1987).
- Kartodirjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*, (Jakarta: Gramedia, 1999).
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1999).
- Lueey, William Leo, *History: Method and Interpretation*, (Chicago: Layola University Press, 1958).
- Majalah Asia Raya, "Berita tentang Indonesia Merdeka," Tahun 1944.

- Majalah Tebu Ireng, Edisi April 1986.
- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Nugroho, Anjar, “Wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler,” *Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.9 No.2 Juli - Desember 2013.
- Ricklefs, Mc., “A History of Modern Indonesia”, a.b. Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007).
- Setiadjaya, Barlan, *Merdeka Atau Mati di Surabaya*, Jilid I, (Jakarta: Widyaswara Kewiraan, 1985).
- Soera Meoslimin Indonesia, 1 Februari 2604.
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Suryanegara, Ahmad Mansyur, *Api Sejarah 2*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010).
- Umar, Muin, A. dkk, *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan Seminar IAIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985).
- Tim Peneliti Fakultas Adab IAIN Surabaya, *Sejarah Hizbullah Jawa Timur*, Surabaya.
- Zuhri, Saifuddin, *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS. 2012).